BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada dasarnya lahir dalam kanvas perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Keterlibatan ABRI dalam sosial-politik erat kaitannya dengan konsep dwifungsi ABRI sebagai doktrinnya. Doktrin itu sejauh pemahaman kita bukanlah sebuah doktrin yang mati yang ditetapkan untuk selama-lamanya, tetapi merupakan doktrin yang hidup atau dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain implementasi konsep ini tidak semestinya sama pada setiap kondisi masyarakat. Dwifungsi ABRI yang digunakan secara luas sejak berdirinya

Orde Baru. Istilah ini sebelumnya tidak digunakan atau jarang terdengar, meskipun konsepnya sudah ada.

Seperti doktrin perjuangan TNI yang dihasilkan dalam seminar TNI Tri Ubaya Cakti yang dihasilkan dalam seminar TNI-AD (April 1965) yang antara lain menegaskan bahwa “sebagai Golongan Karya Angkatan Bersenjata... merupakan suatu kekuatan sosial politik dan kekuatan militer. Konsep dwifungsi juga terkandung secara implisit pada gagasan Mayjen A.H. Nasution (Kepala Staf AD) pada tahun 1958 dengan konsep “jalan tengah”, di mana peran tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka, Rahman (1998:145).

Setelah penyerahan kedaulatan, pemimpin-pemimpin tentara telah menerima kedudukannya sebagai kekuatan militer yang diletakkan sebagai kekuasaan militer yang di letakkan di bawah kekuasaan pemerintah sipil. Meskipun tentara tidak memainkan peran formal dalam pemerintahan, para perwira tetap memperhatikan perkembangan dalam bidang sosial-politik, terbukti banyak perwira secara individual (bukan TNI sebagai institusi) melibatkan diri dalam kegiatan politik. Terlebih pada masa sistem demokrasi terpimpin, peran ABRI dalam struktur pemerintahan sipil meningkat dengan cepat. Banyak perwira dikaryakan sebagai menteri, gubernur, bupati, direksi perusahaan negara, duta besar dan masih banyak lagi. Demikian halnya pada masa awal Orde Baru, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ABRI menjadi kekuatan dominan dalam pemerintahan, sehingga muncul kecenderungan anggapan dalam masyarakat untuk menyamakan dwifungsi dengan dominasi militer.

Pada awal Orde Baru yang terus berlanjut sampai sekarang, dwifungsi dalam arti struktural terus dijalankan karena perwira-perwira ABRI terus memainkan peranan penting dalam struktur pemerintahan secara langsung. Dimana militer menjadi kunci hampir di semua jabatan pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya, Rahman (1998 :146).

Nampaknya ini sejalan dengan dengan upaya pemerintah mewujudkan stabilitas sebagai prasyarat terlaksananya pembangunan. Pandangan mereka dan bukti sejarah menunjukkan, bahwa hanya ABRI yang dapat menjamin stabilitas pembangunan ekonomi di Indonesia. Sekiranya ABRI mundur dari partisipasi aktifnya dalam bidang pemerintahan, apakah stabilitas politik mampu terjamin dan proses pembangunan ekonomi tidak terganggu. Selain itu, apakah tanpa ABRI pemerintah mampu mengatasi peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh SARA dan mampu menjamin integritas bangsa dan negara?

ABRI dalam pelaksanaan kiprahnya khususnya sebagai kekuatan sosial politik menduduki jabatan-jabatan penting, seperti Presiden beberapa Lembaga Tinggi Negara dan menduduki beberapa pos Menteri, serta Gubernur untuk beberapa dekade masih dikuasai ABRI.

Lebih jauh ditandaskan bahwa ABRI dikatakan juga sebagai kekuatan sosial politik merupakan penjelmaan panggilan tugas, tekad dan ketetapan hati sebagai prajurit pejuang yang senantiasa manunggal dengan rakyat di dalam keperansertannya menentukan tujuan, haluan dan politik negara yang mengemban fungsinya dengan

menampilkan diri sebagai pelopor, dinamisator, dan stabilisator negara, Rahman (1998:149)

Dari pandangan dan gambaran yang dipaparkan diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan pengkajian tentang **Peranan TNI Dibidang Kekuatan Sosial Politik Dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Di Masa Orde Baru.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Latar belakang TNI mempunyai peranan Di Bidang Kekuatan Sosial Politik Dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Di Masa Orde Baru.
2. Peranan TNI Di Bidang Sosial Politik Di Masa Orde Baru
3. Pengaruh TNI sebagai kekuatan sosial politik dalam kaitannya dengan mewujudkan stabilitas keamanan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas maka peneliti dapat membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu pada Peranan TNI Di Bidang Kekuatan Sosial Politik Dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Di Masa Orde Baru.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana latar belakang TNI Sebagai Kekuatan Sosial Politik.
2. Bagaimanakah Keberadaan TNI Sebagai Kekuatan Sosial Politik di Masa Orde Baru
3. Bagaimana pengaruh TNI sebagai kekuatan sosial politik dalam kaitannya dengan mewujudkan stabilitas keamanan.

E. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai suatu sasaran tertentu maka selalu berpegang pada tujuan, dimana tujuan itulah yang merupakan gambaran dari masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah latar belakang TNI mempunyai peranan dibidang Kekuatan Sosial Politik Di Masa Orde Baru.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Peranan TNI Di Bidang Sosial Politik Di Masa Orde Baru
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh TNI sebagai kekuatan sosial politik dalam kaitannya dengan mewujudkan stabilitas keamanan.

F. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang ingin diperoleh sesudah melakukan penelitian ini adalah

1. Memberi sumbangan Ilmiah tentang sejarah Peranan TNI Di Bidang Kekuatan Sosial Politik Dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Di Masa Orde Baru.
2. Memberikan informasi serta dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti, akademisi dan masyarakat sehubungan dengan Peranan TNI Di Bidang Kekuatan Sosial Politik Dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Di Masa Orde Baru.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang Peranan TNI Di Bidang Kekuatan Sosial Politik Dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Di Masa Orde Baru
4. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang Peranan TNI Di Bidang Kekuatan Sosial Politik Dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Di Masa Orde Baru